



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 28 APRIL - 3 MEI 2018**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, Komisi IX DPR RI mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

1.2 Dasar Kegiatan

- a. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018.
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI, 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
- Menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
- Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor Pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Belitung secara khusus dan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung secara umum terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

1.4 Peserta

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Wakil Komisi IX Bapak Dr.H. Saleh Daulay, M.Ag, M.Hum, MA dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

| NO | NO. ANGG. | N A M A | Keterangan | FRAKSI | DAPIL |
|----|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 1 | A - 460 | DR.SALEH PARTAONAN DAULAY,M.Ag.,M.Hum.,MA | KETUA | PAN | SUMUT II |
| 2 | A - 155 | Dr. RIBKA TJIPTANING | Anggota | PDIP | JABAR IV |
| 3 | A - 208 | MARINUS GEA, SE.,M.Ak.N | Anggota | PDIP | BANTEN III |
| 4 | A - 238 | DELIA PRATIWI Br. SITEPU, SH | Anggota | PGOLKAR | SUMUT III |
| 5 | A - 239 | BETTI SHADIQ PASADIGOE | Anggota | PGOLKAR | SUMBAR I |
| 6 | A - 312 | H. SYAMSUL BACHRI.,M.Sc | Anggota | PGOLKAR | SULSEL II |
| 7 | A - 325 | KHAIDIR ABDURAHMAN, S.IP | Anggota | PGERINDRA | ACEH II |
| 8 | A - 355 | Hj. SRI WULAN, SE | Anggota | PGERINDRA | JATENG III |
| 9 | A - 396 | ROBERTH ROUW | Anggota | PGERINDRA | PAPUA |
| 10 | A - 449 | Dr. VERNA GLADIES MERRY INGKIRIWANG | Anggota | P DEMOKRAT | SULTENG |
| 11 | A - 499 | HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, SH | Anggota | PPAN | KALTENG |
| 12 | A - 40 | H. HANDAYANI, SKM | Anggota | PKB | JAMBI |
| 13 | A - 42 | ARYANTO MUNAWAR | Anggota | PKB | LAMPUNG II |
| 14 | A - 99 | Dr. ADANG SUDRAJAT,MM.,AV | Anggota | PKS | JABAR II |
| 15 | A - 513 | Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si | Anggota | PPP | DKI II |
| 16 | | MINARNI, SH | Sekretariat Komisi IX DPR RI | | |
| 17 | | LAILAN SAFINA, S.Sos | Sekretariat Komisi IX DPR RI | | |
| 18 | | LISTYA SHINTYA DEBBY | Sekretariat Komisi IX DPR RI | | |
| 19 | | LATIFATUL HASANAH,S.SI.,MPH | Tenaga Ahli | | |
| 20 | | HAZUARLI, S.Ag.,M.Ud | Tenaga Ahli | | |
| 21 | | DODY MUHARAM | TV Parlemen | | |
| 22 | | IWAN ARMANIAS | Pemberitaan | | |

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau biasa disingkat Babel merupakan provinsi ke-31 di Indonesia, sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Dasar hukum penetapan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah UU No 27 Tahun 2000 tanggal 21 November 2000 yang terbagi kedalam tiga wilayah administratif, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Kemudian, di tahun 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan empat kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Hal ini didasarkan pada UU No 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003.

Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan dua pulau besar yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain pulau-pulau kecil lainnya. Letak wilayah provinsi ini adalah $104^{\circ}50'$ sampai $109^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}50'$ sampai $4^{\circ}10'$ Lintang Selatan. Batas wilayah Prov. Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- Barat: Selat Bangka
- Timur: Selat Karimata
- Utara: Laut Natuna
- Selatan: Laut Jawa



Gambar 1. Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PROFIL KABUPATEN BELITUNG

Letak geografis, Kabupaten Belitung terletak antara $107^{\circ} 08' BT - 107^{\circ} 58' BT$ dan $02^{\circ} 30' LS$ sampai $03^{\circ} 15' LS$. Luas wilayah Kabupaten Belitung terdiri dari luas daratan dan luas perairan. Luas daratan kurang lebih 2.293 Km^2 dan luas perairan laut kurang lebih 6.363 Km^2 . Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Belitung merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, disamping itu masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Naduk.

Kabupaten Belitung mempunyai keunggulan pariwisata yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional. Maka, pemerintah pusat menilai wilayah Tanjung Kelayang di Kabupaten Belitung memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Untuk itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Maret 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.

Tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Belitung sangat bervariasi. Hal ini disebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata, dimana permukiman penduduk terkonsentrasi di Tanjungpandan, yang merupakan ibukota Kabupaten Belitung, dengan kepadatan penduduk sebesar 258 jiwa/km². Hal ini terjadi karena Kecamatan Tanjungpandan merupakan ibukota Kabupaten Belitung serta pusat kegiatan perekonomian Belitung yang berpusat pada perdagangan, perhotelan, rumah makan dan restoran, serta pusat pendidikan walaupun luas wilayah Tanjungpandan hanya 16,5% dari total luas Belitung.



Gambar 2. Peta Kabupaten Belitung

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

BIDANG KESEHATAN

3.1 Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.018.339.197.192.350,-. Jika melihat proyeksi alokasi Kesehatan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 171.032.039.858,- sedangkan total APBD Kabupaten Rp. 1.042.991.380.153.830, dimana persentase antara APBD Kabupaten dengan Anggaran Kesehatan adalah 15,14%, maka untuk alokasi anggaran kesehatan sudah sesuai dengan amanat UU Kesehatan.

Salah satu prioritas penggunaan anggaran kesehatan yaitu untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin disarana kesehatan strata pertama dalam satu tahun.

Jumlah masyarakat miskin yang ada sebanyak 113.493 jiwa dan yang mendapat pelayanan 97.416 jiwa atau 85.43%. Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru). Tahun 2016 di kabupaten jumlah masyarakat miskin yang dirujuk sebanyak 7.955 orang atau 100.00 %.

3.2 Penduduk

Penduduk Kabupaten Belitung dari 152.853 Jiwa, jumlah laki-laki sebanyak 78.086 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 74.767 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Berdasarkan golongan umur dapat dilihat penduduk golongan umur 30-34 tahun merupakan golongan umur tertinggi jumlahnya, laki-laki sebanyak 6.953 orang dan perempuan sebanyak 6.573 orang.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung sampai Desember Tahun 2016 berdasarkan dari data program PBI (Penerima Bantuan Iuran) berjumlah 113.493 jiwa atau 74,25% dari jumlah seluruh penduduk kabupaten Belitung tahun 2016. Semua mendapat pelayanan kesehatan dari Jaminan Kesehatan Nasional . Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Sarana Pelayanan Kesehatan Srata 1 sebanyak 97.416 atau sebesar 85,83 % , yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan Strata 3 sebanyak 7.955 orang atau sebesar 100 % dibandingkan dengan seluruh masyarakat miskin yang harus dirujuk.

3.3 Angka Kematian Anak dan Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Belitung tahun 2016 adalah 12 per 1000 kelahiran hidup sedangkan target MDG's sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup ditahun 2016. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1000 Kelahiran hidup . AKABA di kabupaten Belitung tahun 2016 adalah 14 sedangkan target Nasional dan target MDG's adalah 32 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2016. Angka Kematian Balita ini disamping menggambarkan keberhasilan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), juga menggambarkan keadaan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Dalam arti luas indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial dan tingkat kemiskinan penduduk.

Adapun jumlah kematian ibu tahun 2016 sebanyak 4 (Empat) orang dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 2.711 dan didapatkan angka 148/100.000 kelahiran hidup ,sedangkan target Nasional yang tertuang dalam MDG's adalah 102/100.000 kelahiran hidup ditahun 2016. AKI juga dapat digunakan sebagai pemantauan kematian terkait dengan kehamilan . Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan . AKI di Kabupaten Belitung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

3.4 Malaria dan Demam Berdarah

Tahun 2014 Kabupaten Belitung mendapatkan sertifikat eliminasi malaria dari kementerian kesehatan, penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Belitung angka kesakitan malaria dibawah 1/00 (permil). Jumlah kasus Malaria di Kabupaten Belitung di tahun 2016 sebanyak 2 penderita (dengan pemeriksaan darah (+)) di kecamatan Mambalong. Malaria salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDG,s. Ditjen PP&PL Kementerian Kesehatan Indonesia telah menetapkan stratifikasi endemisitas malaria suatu wilayah di Indonesia menjadi 4 strata yaitu : - Endemis tinggi apabila API > 5 per 1.000 Penduduk. - Endemis sedang apabila API berkisar antara 1 – 5 per 1.000 Penduduk. - Endemis rendah apabila API berkisar antara 0 – 1 per 1.000 Penduduk - Non Endemis adalah daerah yang tidak terdapat penularan malaria (Daerah pembebasan malaria) atau API = 0. Annual Parasite Incidence (API) adalah angka kesakitan malaria berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium / 1000 penduduk dalam 1 tahun yang dinyatakan per mil. Annual Parasite Incidence (API) Kab Belitung untuk tahun 2016 adalah 0,01 per 1.000 Penduduk.

Pada tahun 2012 jumlah kasus DBD sebanyak 348 dengan kematian sebanyak 2 orang. Ditahun 2013, jumlah kasus menurun menjadi 191 kasus atau 111.87 per 100.000 penduduk dengan kematian 0. Di Tahun 2014 menurun menjadi 24 kasus atau 13.9 per 100.000 Penduduk , dengan angka kematian 0. di tahun 2015 jumlah kasus meningkat menjadi 120 kasus dengan kematian 2 sedangkan di tahun 2016 jumlah kasus 202 dengan kematian 0.

3.5 Gizi Buruk

di Kabupaten Belitung tahun 2016 ditemukan ada 7 kasus gizi buruk dan telah mendapat perawatan ,kasus tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Tanjungpandan Gizi buruk tahun 2016 di Kabupaten Belitung sebanyak 7 Balita. Penyebab gizi buruk tersebut dikarenakan 5 balita dengan penyakit penyerta (TB, Cacat, Hypocephalus) dan 2 balita dengan kesalahan pola asuh.

3.6 Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Tahun 2016 jumlah Puskesmas ada 9 yaitu Puskesmas Tanjungpandan, Air Saga, Perawas, Badau, Sijuk, TanjungBinga, Mambalong, Simpang Rusa, Selat Nasik terdiri dari 6 Puskesmas Non Perawatan dan 3 Puskesmas dengan Perawatan. Jumlah puskesmas pembantu 33 Pustu dengan kondisi baik. Jumlah puskesmas keliling yang terdapat di Kabupaten Belitung tahun 2016 Untuk Pusling R-4 sebanyak 10 dengan kondisi baik . Pusling perairan sebanyak 2 dengan kondisi rusak berat 1 dan rusak ringan 1. Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan terdapat 100%. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Belitung tahun 2016 sebanyak 3 buah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Almah dan Rumah Sakit Utama .

Data dari SDMK kabupaten Belitung tahun 2016 mencatat jumlah dokter spesialis ada 35 orang dengan Rasio 22,90 per 100.000 penduduk; dokter umum di sarana pelayanan kesehatan adalah 68 orang dengan rasio 44,49 per 100.000 penduduk. Jumlah dokter gigi disarana pelayanan kesehatan adalah 15 orang dengan rasio 9,81 per 100.000 penduduk; jumlah bidan disarana pelayanan kesehatan adalah 125 orang dengan rasio 81,78 per 100.000 penduduk; jumlah perawat disarana pelayanan kesehatan adalah 394 orang dengan rasio 257,76 per 100.000 penduduk; jumlah tenaga kefarmasian disarana pelayanan kesehatan adalah 22 orang dengan rasio 14,39 per 100.000 penduduk; jumlah tenaga gizi disarana pelayanan kesehatan adalah 11 orang dengan rasio 7,20 per 100.000 penduduk; jumlah tenaga kesehatan masyarakat disarana pelayanan kesehatan adalah 24 orang dengan rasio 15,70 per 100.000 penduduk; jumlah tenaga sanitasi disarana pelayanan kesehatan adalah 17 orang dengan rasio 11,12 per 100.000 penduduk.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

IV. REKOMENDASI

BIDANG KESEHATAN

1. Secara keseluruhan, pelayanan kesehatan berjalan dengan baik di Kabupaten Belitung yang telah didukung dengan alokasi anggaran kesehatan yang sudah memenuhi amanat UU Kesehatan. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan juga peserta JKN yang seringkali mendapatkan perlakuan yang belum optimal. Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Pusat untuk terus melakukan perbaikan di tingkat regulasi teknis pelaksanaan JKN khususnya untuk membenahi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan termasuk peningkatan kualitas pemberi layanan baik layanan administrasi dan layanan kesehatan.
2. Dalam kunjungan ke di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.H. Marsidi Judono disampaikan bahwa ada kekurangan dokter spesialis. Beberapa ide yang bisa diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung yaitu memberikan beasiswa pendidikan kepada putra-putri terbaik Belitung dan membuat kontrak kerja untuk pengabdian pasca pendidikan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Belitung juga bisa mengusulkan ke Kementerian Kesehatan RI untuk mendapatkan alokasi penempatan dokter spesialis dalam program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Komisi IX DPR RI akan membahas permasalahan pemerataan dokter spesialis dengan Menteri Kesehatan.
3. Komisi IX DPR RI sangat memperhatikan permasalahan gizi buruk dan stunting yang prevalensinya masih sangat besar yaitu 37 %. Oleh karena itu, meminta Pemerintah Kabupaten Belitung untuk meningkatkan peran serta yang aktif dalam menanggulangi permasalahan stunting ini, termasuk melaksanakan program dasar pelayanan kesehatan ibu dan anak dan juga mengaktifkan program pemberian ASI dan juga memastikan adanya *therapeutic feeding centre* (TFC) jika ada kasus gizi buruk.

Di level nasional, Komisi IX DPR RI akan membahas permasalahan stunting dengan Menteri Kesehatan dalam Rapat Kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.

4. Permasalahan terkait pelaksanaan UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga hampir terjadi di semua provinsi dimana sampai saat ini belum terbentuknya BKKBD. Temuan kunjungan kerja bahwa adanya PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebut menjadi kendala pembentukan BKKBD. Untuk itu, Komisi IX DPR RI akan mengagendakan pembahasan terkait hal ini dalam RDP dengan BKKBN.
5. Terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menarik urusan keluarga berencana menjadi urusan pemerintah pusat termasuk mengenai tenaga PKB/PLKB. Dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2019, Komisi IX DPR RI akan memastikan alokasi anggaran untuk honor tenaga PKB/PLKB.

V. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung pada Reses masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017 – 2018. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah di daerah, khususnya di Kabupaten Belitung.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR-RI, Pemerintah Daerah, para Kepala Dinas, dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Tim Komisi IX DPR RI di Kabupaten Belitung, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2018

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA TIM,

ttd

Dr.H. Saleh Daulay, M.Ag, M.Hum, MA

A- 460